

# POLICY BRIEF

## “Afirmasi Kurikulum dan Metode Pelaksanaan Latsar CPNS di Wilayah Timur: Menuju Kesetaraan Kompetensi ASN Nasional”

*disusun oleh*

Wahyunni Fajaruddin, S.H, M.H  
Fajar Lingga Prasetya, S.AB

*ditujukan kepada:*

- LAN RI
- KemenPANRB
- Kementerian Keuangan
- Pemerintah Daerah

### Executive Summary

Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS merupakan instrumen penting dalam membentuk kompetensi dasar ASN Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 1 dan 2 Tahun 2023, kurikulum dan metode pelatihan ASN dirancang secara nasional dengan pendekatan blended learning dan e-learning sebagai bagian dari transformasi digital ASN. Namun, dalam praktiknya, penerapan standar nasional tersebut belum sepenuhnya efektif di wilayah timur Indonesia seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur digital, tenaga pelatih tersertifikasi, serta literasi teknologi peserta. Kondisi ini mengakibatkan pelatihan sering kali hanya berorientasi pada formalitas, belum mampu membentuk ASN berprofil Smart ASN yang profesional, adaptif, dan kolaboratif sesuai tujuan kebijakan LAN.

Masalah utama pelaksanaan Latsar CPNS di kawasan timur bukan semata-mata terletak pada kendala teknis, tetapi pada ketidakselarasan desain kebijakan nasional dengan kapasitas wilayah. Kebijakan pelatihan yang bersifat one-size-fits-all tidak mempertimbangkan kesenjangan digital, sosial, dan kelembagaan antarwilayah. Data dari Kominfo (2023) menunjukkan bahwa Indeks Literasi Digital Papua (2,73) dan Maluku (2,85) masih jauh di bawah rata-rata nasional (3,49), sementara IP-TIK Bappenas (2022) menunjukkan capaian Papua hanya 32,7 dibanding 72,5 di DKI Jakarta. Ketimpangan ini menyebabkan learning disruption yang berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran, keterlambatan penyelesaian tugas daring, serta menurunnya motivasi peserta. Dengan demikian, masalah yang dihadapi bersifat sistemik, kebijakan nasional belum menyediakan ruang adaptasi untuk konteks regional yang berbeda.

Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, terdapat tiga opsi kebijakan yang dapat dipertimbangkan. Pertama, afirmasi kurikulum dan modul pelatihan dengan memberi ruang adaptasi berbasis konteks lokal, menambahkan modul literasi digital dasar dan komunikasi publik inklusif, serta menyusun Buku Saku Latsar ASN 3T sebagai panduan praktis. Kedua, penyesuaian metode pelaksanaan melalui penerapan model klasikal penuh di wilayah dengan keterbatasan jaringan, pengembangan media belajar offline (video, booklet, USB learning kit), dan mentoring lintas wilayah. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan pelatihan daerah dengan menetapkan Pusjar SKMP Makassar dan BPSDM Provinsi sebagai Regional Learning Hub, menyelenggarakan TOT bagi widyaiswara daerah timur, serta membentuk konsorsium BPSDM wilayah timur dengan dukungan anggaran afirmatif dari LAN dan Kemenkeu. LAN RI perlu memimpin perumusan Panduan Teknis Afirmasi Pelatihan Wilayah Timur sebagai langkah awal reformasi kebijakan pelatihan ASN yang berkeadilan, memastikan setiap ASN memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi bagi kemajuan birokrasi Indonesia. Ketiga opsi ini saling melengkapi dalam menciptakan sistem pelatihan yang inklusif dan adaptif terhadap kesenjangan digital.

# PENDAHULUAN

Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS merupakan instrumen strategis pembentukan kompetensi ASN di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Kepala LAN Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum Pelatihan Struktural Kepemimpinan dan Keputusan Kepala LAN Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan, pemerintah telah menetapkan standar nasional pembelajaran ASN dengan menekankan tiga aspek utama: pembentukan kompetensi kepemimpinan, digitalisasi birokrasi, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila. Metode pelatihan yang diatur mencakup pembelajaran klasikal, blended learning, e-learning, dan distance learning, sebagai bentuk transformasi menuju ASN yang adaptif terhadap era digital.

Namun, dalam implementasinya, model pembelajaran berbasis digital tersebut belum berjalan efektif di wilayah timur Indonesia, terutama di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara. Keterbatasan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi peserta, kurangnya tenaga pelatih tersertifikasi, serta keterbatasan sarana prasarana pelatihan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan blended learning. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan kualitas pelatihan dibanding wilayah barat, di mana fasilitas dan akses teknologi sudah lebih memadai.

Kebijakan LAN saat ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme adaptasi atau affirmative adjustment bagi daerah dengan karakteristik geografis dan sosial khusus seperti wilayah 3T. Akibatnya, pelaksanaan Latsar CPNS di kawasan timur sering kali hanya menekankan aspek administratif dan kepatuhan prosedural, belum optimal dalam membentuk kompetensi ASN secara utuh sesuai standar nasional. Padahal, esensi kurikulum Latsar adalah menghasilkan ASN berprofil Smart ASN yakni ASN yang profesional, adaptif, kolaboratif, serta melek digital.

Permasalahan ini semakin nyata jika dikaitkan dengan data empirik. Berdasarkan Survei Literasi Digital Nasional Kominfo dan Katadata (2023), Papua (2,73) dan Maluku (2,85) memiliki indeks literasi digital jauh di bawah rata-rata nasional (3,49). Sementara itu, data Bappenas (2022) melalui Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) menunjukkan capaian Papua hanya 32,7 dan NTT 36,4, dibandingkan 72,5 di DKI Jakarta. Rendahnya kapasitas digital tersebut diperparah dengan cakupan jaringan 4G di bawah 50% serta ketersediaan perangkat belajar yang terbatas. Kondisi faktual ini menunjukkan bahwa asumsi kesiapan digital nasional belum sesuai dengan realitas kawasan timur.

Masalah mendasar pelaksanaan Latsar CPNS di kawasan timur bukan semata kendala teknis, melainkan ketidakselarasan desain kebijakan nasional dengan kapasitas dan karakteristik wilayah. Pertama, kebijakan pelatihan ASN masih bersifat one size fits all, yakni mengasumsikan seluruh wilayah memiliki kemampuan dan kesiapan yang sama untuk mengimplementasikan metode digital. Padahal, disparitas infrastruktur dan literasi digital membuat pendekatan seragam ini tidak efektif. Banyak peserta mengalami gangguan pembelajaran (learning disruption) selama sesi daring yang berakibat pada rendahnya penyelesaian modul dan menurunnya motivasi belajar.

Kedua, desain kurikulum nasional belum mengakomodasi konteks sosial-budaya lokal. Peserta Latsar di kawasan timur yang memiliki keragaman latar belakang pendidikan dan budaya membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih visual, naratif, dan berbasis pengalaman nyata. Modul nasional yang dominan berbasis teks dan abstraksi konseptual tidak selalu sesuai dengan gaya belajar partisipatif yang lebih efektif di wilayah timur. Dengan demikian, akar persoalan pelaksanaan Latsar CPNS di wilayah timur adalah kesenjangan adaptasi kebijakan nasional terhadap kondisi regional, bukan sekadar hambatan teknis.

# DESKRIPSI MASALAH

Permasalahan utama pelaksanaan Latsar CPNS di wilayah timur meliputi keterbatasan akses internet, rendahnya literasi digital, terbatasnya tenaga pelatih dan mentor, serta perbedaan kemampuan dasar peserta. Akar masalah meliputi kebijakan yang seragam tanpa afirmasi, infrastruktur rendah, serta kapasitas kelembagaan daerah yang belum merata. Standar nasional penyelenggaraan pelatihan ASN belum mempertimbangkan kesenjangan regional, sehingga pelaksanaan di daerah 3T menemui kendala substansial dan teknis.

## Akar Permasalahan

Dimensi	Permasalahan Utama	Dampak
<b>Kebijakan</b>	Kurikulum dan pedoman bersifat seragam nasional tanpa ruang afirmasi	Tidak ada fleksibilitas metode bagi daerah 3T
<b>Teknis</b>	Infrastruktur digital rendah, terbatasnya pelatih dan mentor	Kegiatan e-learning dan blended learning tidak berjalan optimal
<b>Bahan Pembelajaran</b>	Modul yang terlalu banyak teks dan abstraksi konseptual kurang sesuai dengan gaya belajar partisipatif yang lebih baik diterapkan untuk wilayah timur	Pembelajaran tidak tuntas, hanya sekedar pemenuhan kewajiban tanpa mengerti makna materi yang ingin dituliskan dari modul
<b>Kultural</b>	Latar belakang sosial, bahasa, dan literasi peserta beragam	Kesulitan memahami modul nasional berbasis teks dan konsep
<b>Kelembagaan</b>	Kapasitas lembaga pelatihan daerah (BPSDM) belum merata	Kualitas pelatihan antarwilayah timpang
<b>Anggaran</b>	Biaya tambahan pelatihan di daerah 3T belum diakomodasi dalam DIPA nasional	Pelaksanaan terbatas dan bergantung pada dukungan daerah

Kebijakan yang seragam (one size fits all) dalam pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS saat ini, yang tidak secara eksplisit mengatur mekanisme adaptasi atau affirmative adjustment untuk daerah dengan karakteristik khusus seperti wilayah timur, menimbulkan beberapa dampak negatif. Dampak-dampak ini meliputi:

- Penurunan efektivitas pembelajaran, terutama dalam aktualisasi nilai dan kegiatan kreatif. Kurikulum Latsar CPNS perlu memberi fleksibilitas bagi lembaga pelatihan di wilayah timur untuk menyesuaikan contoh kasus, pendekatan belajar, dan materi aktualisasi sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat. Dengan adanya ruang adaptasi ini, materi pembelajaran menjadi lebih relevan dengan tantangan birokrasi di daerah, seperti pelayanan publik di wilayah kepulauan, perbatasan, atau komunitas adat.
- Kesenjangan kompetensi ASN baru antarwilayah, terutama pada kemampuan berpikir analitis dan penggunaan teknologi.
- Penurunan motivasi peserta karena kendala teknis dianggap sebagai kelemahan individu, bukan hambatan sistemik.
- Rendahnya keberlanjutan dampak pelatihan terhadap kinerja organisasi daerah.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

## 1 Afirmasi Kurikulum dan Modul Pelatihan

- Revisi kurikulum nasional agar memuat ruang adaptasi berbasis konteks lokal.

Kurikulum Latsar CPNS perlu memberi fleksibilitas bagi lembaga pelatihan di wilayah timur untuk menyesuaikan contoh kasus, pendekatan belajar, dan materi aktualisasi sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat. Dengan adanya ruang adaptasi ini, materi pembelajaran menjadi lebih relevan dengan tantangan birokrasi di daerah, seperti pelayanan publik di wilayah kepulauan, perbatasan, atau komunitas adat.

- Penambahan modul literasi digital dasar dan komunikasi publik inklusif.

Modul tambahan ini bertujuan memastikan semua peserta, terutama di daerah dengan literasi digital rendah, memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi pembelajaran daring dan berkomunikasi secara efektif. Selain itu, modul komunikasi publik inklusif akan membantu ASN memahami pentingnya pendekatan pelayanan yang sensitif terhadap keberagaman budaya dan bahasa di wilayah timur.

- Pengembangan Buku Saku Afirmasi Latsar ASN 3T.

Buku saku ini berfungsi sebagai panduan praktis bagi peserta dan pelatih di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal). Isinya mencakup panduan kegiatan aktualisasi sederhana, tips belajar digital dengan keterbatasan koneksi, serta contoh praktik baik dari daerah lain. Materi tersebut menjadi alat bantu pembelajaran adaptif yang dapat diakses tanpa jaringan internet.

## 2 Penyesuaian Metode Pelaksanaan

- Model klasikal penuh (tatap muka) di wilayah dengan keterbatasan jaringan.

Di daerah yang infrastruktur digitalnya belum memadai, pelaksanaan Latsar dapat dilakukan sepenuhnya secara tatap muka untuk menjamin efektivitas transfer pengetahuan. Pendekatan ini memastikan kegiatan inti seperti pembentukan nilai dasar ASN, diskusi kelompok, dan praktik aktualisasi dapat berjalan tanpa hambatan teknis

- Pengembangan modul offline (video, booklet, USB learning kit).

Materi pelatihan yang biasanya hanya tersedia secara daring perlu dikonversi ke format offline-friendly agar tetap dapat digunakan tanpa koneksi internet. Media seperti video pembelajaran, USB learning kit, dan booklet interaktif akan menjadi sarana efektif bagi peserta untuk belajar mandiri sekaligus menjaga kesinambungan pembelajaran.

## 3 Penguatan Kapasitas Lembaga Pelatihan Daerah

- LAN menetapkan Pusjar SKMP Makassar dan BPSDM Provinsi sebagai Regional Learning Hub.

Penunjukan ini bertujuan menciptakan pusat koordinasi dan inovasi pelatihan ASN di kawasan timur Indonesia. Regional Learning Hub berfungsi sebagai laboratorium pembelajaran regional yang mengembangkan model, bahan ajar, serta metode pelatihan yang sesuai konteks wilayah timur.

- Penambahan TOT bagi widyaiswara daerah timur.

Pelatih di daerah perlu diperkuat melalui Training of Trainers (TOT) yang berfokus pada metodologi pembelajaran adaptif, digital literacy, dan manajemen kelas berbasis komunitas. Hal ini akan meningkatkan kapasitas lokal sehingga ketergantungan terhadap pelatih pusat berkurang, serta mendorong munculnya inovasi pelatihan berbasis daerah.

# REKOMENDASI KEBIJAKAN

(lanjutan..)

- Pembentukan konsorsium BPSDM timur dan dukungan anggaran afirmatif.

Konsorsium ini menjadi wadah kolaborasi antar-BPSDM provinsi di kawasan timur untuk berbagi sumber daya, modul, dan praktik baik. LAN dapat mengusulkan alokasi afirmatif anggaran pelatihan ASN timur melalui DIPA nasional agar kegiatan penguatan kapasitas lembaga dapat berjalan berkelanjutan.

## Rekomendasi untuk Pihak Terkait

Pihak	Rekomendasi Aksi	Tujuan
LAN	Menyusun Panduan Teknis Afirmasi Pelatihan Wilayah Timur; kebijakan afirmatif yang memberikan fleksibilitas metode, diferensiasi kurikulum, mengembangkan modul kontekstual; Akreditasi lembaga lokal.	Menjamin kesetaraan mutu pelatihan nasional dengan fleksibilitas daerah.
Kementerian PANRB	Integrasikan afirmasi pelatihan dalam kebijakan pengembangan ASN; Tetapkan indikator berbasis wilayah.	Memperkuat arah kebijakan nasional yang adil dan inklusif.
Kementerian Keuangan	Sediakan alokasi afirmasi anggaran pelatihan ASN wilayah timur.	Menjamin keberlanjutan implementasi afirmatif.
BPSDM/Pusjar SKMP Daerah	Menyesuaikan metode pelatihan sesuai kesiapan digital; Kolaborasi co-mentoring; Integrasi kearifan lokal.	Meningkatkan efektivitas pembelajaran kontekstual.
Pemerintah Daerah	Sediakan fasilitas pelatihan; Kaderisasi mentor lokal; Kolaborasi pemantauan hasil pelatihan.	Menguatkan keberlanjutan dan sense of ownership.

Kebijakan afirmasi pelatihan ASN di wilayah timur adalah langkah strategis menuju keadilan pembelajaran dan pemerataan kualitas birokrasi nasional. Dengan dukungan sinergis antara LAN, BPSDM, KemenPANRB, dan pemerintah daerah, setiap ASN memiliki kesempatan yang setara untuk berkembang dan berkontribusi bagi bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2022). Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) Nasional.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika & Katadata Insight Center. (2023). Survei Literasi Digital Nasional.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2023). Keputusan Kepala LAN Nomor 1/K.1/PDP.07/2023 dan Nomor 2/K.1/PDP.07/2023 tentang Kurikulum dan Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan ASN.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). (2024). Kebijakan Transformasi Digital ASN dan Arah Reformasi Pelatihan.
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). (2024). Strategi Pengembangan ASN Berbasis Kompetensi dan Keadilan Wilayah.
- Kominfo. (2023). Laporan Indeks Literasi Digital dan Infrastruktur Internet Nasional.